

PERANAN KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PEMELIHARAAN JALAN UMUM

Oleh : **Sudiyarti**

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

This research is willing to know how to overcome the broken roads in East Kalimantan. There are some roads those are very bad it is, therefore to make same traffic accidents. The location of the research is in Samarinda, East Kalimantan in January 2017 from January to April 2017. The method of the research ia by observing the roads : M.Yamin, Kemakmuran, Sebatik and Juanda. The results of the research are that the conditions of the roads in January to April 2017 are very bad among are : (1). On Jalan M.Yamin there are some holes in front of the Mulawarman University's gate, (2). Kemakmuran there is a broken spot near the Cuture centre service, (3). Sebatik the is a long and dee hole near the BNI 46 office bank, (4). And Juanda there are many holes around the flyover street.

The suggestions of the researher are (1). The government has to repair those roads soon, (2). The Government has to put the signs of danger in the broken spot of the street, (3). The Gvernment has to make planning to arrange the repairment, (4). The user of the roads has to be more careful t ride the cycles.

Keywords : hole, road, repair, user

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kenyamanan berlalulintas sangat terganggu karena kerusakan jalan berupa lubang-lubang menganga yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalulintas. Lebih parah lagi bila pada malam hari lubang-lubang tersebut tidak kelihatan. Bila terjadi banjir otomatis lubang itu sama sekali tak kelihatan. Seharusnya semua pihak ikut memelihara jalan baik pemerintah maupun swasta baik perorangan maupun masyarakat umum.

1. Pihak pemerintah

Pihak pemerintah berkewajiban memelihara jalan baik pemerintah pusat yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat untuk pemeliharaan jalan nasional, pemerintah provinsi yaitu provinsi Kalimantan Timur untuk jalan provinsi dan pemerintah lokal yaitu Pemerintah Kota Samainda untuk jalan kota. Jalan Nasional adalah jalan yang menghubungkan antar provinsi misalnya jalan Samarinda - Balikpapan, Balikpapan - Banjarmasin, Balikpapan - Palangkaraya dan Balikpapan - Tanjung Selor. Jalan provinsi adalah yang menghubungkan antar Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten misalnya jalan Bontang - Sangata, jalan Samarinda - Tenggarong dan lain-lain. Jalan Kota/Kabupaten

misalnya jalan yang menghubungkan antar kecamatan/desa misalnya jalan M.Yamin, Jl. Soetomo, Jl. Kemakmuran dan lain-lain. Pemeliharaan atau *maintenance* adalah kegiatan untuk memperbaiki jalan bila ada terjadi kerusakan, timbul lubang-lubang kecil di badan jalan, aspal mengelupas, semen patah atau pecah dan terkena longsor dan sedimentasi. Jaman Belanda dahulu Dinas Pekerjaan Umum memiliki pengawas jalan yang pekerjaannya keliling mencari dan menyelidiki bila ada bagian jalan yang rusak. Mereka telah membawa bahan untuk perbaikan yaitu batu, aspal, pasir dan lain-lain yang siap untuk perbaikan setempat dan di jalan yang ada tanda-tanda mau rusak.

2. Pihak swasta

Pihak swasta yaitu dari perusahaan pengguna jalan seperti pengusaha transportasi/travel, pengusaha kelapa sawit, kontraktor bangunan, pengusaha pertambangan, pengusaha perkebunan, pengusaha bahan bangunan dan pengusaha lain yang menggunakan jalan seperti evakuasi muatan kapal laut atau EMKL.

a. Pengusaha Bagi transportasi atau travel

Pengusaha transportasi atau travel yang memuat orang bisanya muatannya terukur sehingga tidak merusak jalan apalagi saat ini bis-bis besar jarang laku karena telah direbut oleh travel dengan bis mini, gocar dan gojek. Banyak bis Samarinda-Balikpapan, Samarinda-Sanggatta dan Samarinda Melak yang kosong.

b. Pengusaha perkebunan kelapa sawit

Truk pengangkut kelapa sawit dengan muatan 12 (dua belas) ton sangat merusak jalan misalnya jalan Samarinda-Sanggatta, Melak-Balikpapan dan lain-lain. Kalau jalan-jalan ini terus dilewati truk tersebut niscaya akan cepat rusak. Begitu diperbaiki dalam 3 (tiga) bulan jalan tersebut akan hancur lagi.

c. Pengusaha pertambangan

Aktivitas penambangan batubara di wilayah Kalimantan Timur sangat marak misalnya di wilayah Kutai Kartanegara seperti Samboja, Sungai Siring, Barambai, Kotabangun dan lain-lain, wilayah Samarinda misalnya Sambutan, Batuah dan Samarinda Seberang, wilayah Paser seperti jalan poros Tanah Grogot, daerah sekitar PT. KIDECO dan lain-lain.

d. Pengusaha bahan bangunan

Jalan Balikpapan Sangatta-Bontang, Balikpapan-Melak, Balikpapan-Samarinda selalu dipakai untuk pengangkutan bahan bangunan yang berat seperti alat berat, disel, dan kerangka bangunan dan lain-lain. Biasanya mereka jalan pada malam hari dengan berbarengan sehingga jalan langsung retak-retak dan hancur.

e. Pengusaha lain seperti Evakuasi Muatan Kapal Laut atau EMKL .

Truk Evakuasi Muatan Kapal Laut atau EMKL menderu mengangkut barang dari pelabuhan yang jumlahnya ratusan peti kemas setiap hari sehingga jalan yang dilalui pasti akan mudah rusak apalagi terkena banjir besar jalan tersebut menjadi berlubang.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan publik dalam memelihara jalan di kota Samarinda .

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan Publik dan Pemerintah, menurut para ahli serta komponennya : Kebijakan Publik adalah kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak

variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kepada individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers*. Untuk memengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dan hari ke hari yang membawa dampak pada warganegaranya (Subarso, 2005:87).

Komponen Kebijakan

Menurut Charles O. Jones (1977), kebijakan terdiri dari komponen-komponen :

1. Goal atau tujuan yang diinginkan;
2. Plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan;
3. Program, yaitu undang-undang yang berwenang untuk mencapai tujuan;
4. Decision atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program;
5. Efek, yaitu akibat-akibat dan program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder) (Tangkilisan, 2003:3).

B. Definisi Kebijakan Publik dan Pemerintah Menurut Para Ahli

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt mengatakan Kebijakan dapatlah diberi definisi sebagai suatu keputusan yang siap dilaksanakan dengan ciri adanya kemantapan perilaku dan berulangnya tindakan, baik oleh mereka yang membuatnya maupun oleh mereka yang harus mematuhi (Soenarko, 2003:41).

Chandier & Pia (1988) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Dalam kenyataannya, kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik (Tangkilisan, 2003:1).

Thomas R. Dye mengatakan Kebijaksanaan pemerintah itu adalah apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi Thomas R. Dye itu didasarkan pada kenyataan, bahwa banyak sekali masalah-masalah yang harus diatasinya, banyak sekali keinginan dan kehendak rakyat yang harus dipenuhinya (Soenarko, 2003:41).

Robert Eyestone mengatakan kebijaksanaan pemerintah adalah hubungan suatu lembaga pemerintah terhadap lingkungannya (Soenarko, 2003:42), sedangkan Easton (1969) memberikan pengertian kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup peraturan pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dan sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat (Tangkilisan, 2003:2).

Carl J. Friedrich mengatakan kebijakan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut di dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan tertentu (Soenarko, 2003:42).

C. Pengertian Jalan

Pengertian Jalan adalah prasarana Transportasi Darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jenis-jenis Jalan :

- Jalan raya adalah jalur - jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran - ukuran dan jenis konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan

lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat (Clarkson H.Oglesby, 1999).

- Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- Jalan Khusus adalah jalan yang di bangun oleh instansi, badan usaha. Perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
- Jalan Tol jalan bebas hambatan adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.

Bagian-bagian jalan meliputi :

- Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan.
- Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang ada dibawah pengawasan penyelenggara jalan.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berusaha mendeskripsikan dan menyajikan hasil penelitian secara lengkap sesuai permasalahan yang diteliti, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Data yang diteliti dapat diperoleh dari sumber data sekunder berupa surat kabar, laporan-laporan, jurnal dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

IV. PEMBAHASAN

A. Fasilitas Umum

Fasilitas umum atau disingkat Fasum adalah suatu pemberian peluang kepada masyarakat untuk menggunakan peralatan, tempat dan sarana prasarana lain pada waktu tertentu tanpa membayar sewa. Definisi/pengertian fasilitas umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum. Contoh dari fasilitas umum (fasum) adalah seperti jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, *fly over*, *underpass*, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjar kanal, trotoar, jalur *busway*, tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya.

Arti definisi/pengertian fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman. Contoh dari fasilitas sosial (fasos) adalah seperti puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, dan lain sebagainya. Jika kita lihat dari pengertian yang ada memang sepertinya tidak jauh berbeda. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, fasum dan fasos memiliki arti yang berbeda.

Menurut saya pribadi fasum adalah fasilitas dasar yang dibutuhkan manusia untuk hidup, sedangkan fasos adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan. Arti definisi dan perbandingan antara fasum dan fasos ini lebih mengarah kepada pendapat pribadi.

Fasilitas umum dan fasilitas sosial adalah milik bersama yang harus dijaga dan dirawat dengan baik agar bisa selalu dimanfaatkan secara maksimal untuk jangka panjang. Warga masyarakat dapat saling bahu-membahu untuk membangun dan atau memperbaiki fasum/fasos sendiri jika memang sangat diperlukan tanpa bergantung kepada pemerintah. Tanpa adanya fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Fasilitas

umum maupun fasilitas sosial buatan pemerintah yang dirusak orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan merugikan masyarakat secara umum. Fasum dan fasos yang disediakan oleh pemerintah dibiayai oleh dana yang sebagian besar didapat dari pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi dikumpulkan oleh pemerintah dari masyarakat, sehingga fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan milik masyarakat umum.

B. Kota Samarinda

Berdasar data sensus penduduk 2010, Kota Samarinda memiliki 10 kecamatan dan 59 kelurahan dengan kode pos 75111 hingga 75253. Per tahun 2010 jumlah penduduk di sepuluh kecamatan Samarinda adalah 726.223 jiwa (rasio 107,50). Tingkat kepadatan penduduk di Samarinda adalah 1.011 jiwa/km².

Kota Samarinda dibentuk dan didirikan pada tanggal 21 Januari 1960, berdasarkan Undang - Undang Darurat Nomor. 3 Tahun 1953, Lembaran Negara Nomor. 97 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II Kabupaten/kotamadya di Kalimantan Timur. Semula Kodya Dati II Samarinda terbagi dalam 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Seberang. Kemudian dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur Nomor. 18/SK/TH-Pem/1969 dan SK Nomor. 55/TH-Pem/SK/1969, terhitung sejak tanggal 1 Maret 1969, wilayah administratif Kodya Dati II Samarinda ditambah dengan 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Palaran, Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Samboja (luas sekitar 2.727 km²).

Saat ini pembagian kecamatan di Samarinda tidak termasuk Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Samboja, ketiganya masuk dalam Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 terbit, wilayah administrasi Kodya Dati II Samarinda mengalami pemekaran, semula terdiri dari 4 kecamatan menjadi 6 kecamatan, yaitu :

- Kecamatan Sungai Kunjang
- Kecamatan Samarinda Ulu
- Kecamatan Samarinda Utara
- Kecamatan Samarinda Ilir
- Kecamatan Samarinda Seberang
- Kecamatan Palaran

Pemekaran kecamatan kembali dilakukan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang cukuPeraturan Pemerintahesat dan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat. Kecamatan-kecamatan di Samarinda yang semula berjumlah 6, kini dimekarkan menjadi 10 kecamatan. 4 kecamatan hasil pemekaran tersebut antara lain:

- Kecamatan Samarinda Kota
- Kecamatan Loa Janan Ilir
- Kecamatan Sambutan
- Kecamatan Sungai Pinang

Peresmian kecamatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2010. Jadi, secara administratif Kota Samarinda dibagi menjadi 10 kecamatan dan 53 kelurahan. Ada pun pada tahun 2014 kelurahan di Samarinda bertambah enam sehingga menjadi 59 kelurahan.

Kondisi Jalan rusak

Sebagai kota yang berkembang dengan cepat dan giat, Samarinda harus menerima konsekuensi dari pembangunan yaitu kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang paling gampang dirasakan langsung oleh masyarakat Samarinda tentu saja masalah jalanan rusak dan berdebu yang tidak bisa dipungkiri akan selalu menjadi ciri dari kota yang sedang giat membangun. Kerusakan tersebut karena memang banyak lobang-lobang seperti di Jl. Sebatik dekat Bank BNI 46, Jl. M.Yamin di depan gapura Universitas Mulawarman, Jl. Lambung Mangkurat, dan lain-lain.

Terdapat contoh 5 jalanan di Samarinda yang dinilai sebagai jalanan paling menyebalkan karena berbagai alasan, yaitu :

1. Jalan PM. Noor Samarinda



"Wisata Debu"

Photo by : Tribun Kalimantan Timur

Sebuah jalan panjang yang berada di wilayah kelurahan Sempaja Selatan. Sebuah jalan yang jika dengan terpaksa harus dilalui para pengendara kendaraan bermotor pastilah akan menimbulkan keluhan kesah dan ketidaknyamanan. Utamanya masalah yang dihadapi jalan PM. Noor adalah masalah Debu. Masyarakat setempat dengan sarkasme sedang tinggi-tingginya bahkan pernah menuliskan "Wisata Debu" di median jalan tersebut. Debu yang tersebar dengan merata di jalan tersebut disebabkan oleh kendaraan-kendaraan besar pengangkut komoditas bahan bangunan yang seringkali dengan angkuhnya melewati jalan tersebut, diperparah lagi dengan banyaknya kerusakan di badan jalan tersebut yang seringkali menyebabkan kecelakaan ketika para pengendaranya lengah.

2. Jalan Abdul Wahab Sjahranie



"Behancuran Sementara"

Photo by : PDAM Samarinda

Jalan yang bisa disingkat menjadi AWS ini masih berhubungan langsung dengan jalan PM. Noor sebagai jalur yang kerap dilewati kendaraan pengangkut berbadan ekstra besar. Jalan ini sebenarnya masih termasuk mulus dan tidak terlalu terasa berdebu seperti Jalan PM. Noor, meski begitu jalan ini termasuk menyebalkan karena suasananya yang masih saja sepi, beberapa lubang yang dibiarkan menganga, dan memiliki beberapa kelokan dan tanjakan yang kurang nyaman dilalui. Hal utama yang membuat jalan ini semakin susah diakses adalah karena saat ini sedang ada pembangunan *Flyover* di ujung jalan ini yang menuju ke jalan Juanda. Menyebabkan kemacetan yang lumayan bikin kesal.

3. Jalan Pembangunan (Ex. Vorvo)



"Sering Macet"

photo by : asmadie.blogspot.com

Jalan yang dulunya bernama Vorvo ini menjadi salah satu jalan yang paling menyebalkan karena hampir setiap sore selalu ada kemacetan, di jalan ini juga bisa ditemukan *Traffic Light* tepat di bawah turunan jalan, sesuatu yang tidak lumrah kita temui di jalanan di kota lain. Tanjakan di jalan ini memang agak tanggung dan bikin *awkward* para pengendara kendaraan bermotor. Selain itu jalan ini juga sering dipenuhi kendaraan-kendaraan yang parkir sembarangan, padahal letak jalan ini cukup vital sebagai *intersection* menuju jalan-jalan lain yang lebih penting di Samarinda.

4. Jalan Ir Sutami



"Ini Jalanan?"

photo by : gerbangKalimantan Timur.com

Tidaklah mengherankan bila jalan ini menjadi “juara” dalam soal urusan jalanan paling menyebalkan di Samarinda. Bagaimana tidak ? Jalan ini sudah tidak terawat lagi karena setiap hari harus menanggung beban dilewati truk-truk pengangkut kontainer berukuran besar. Lokasi kawasan pergudangan memang berada disini, itu salah satu alasan krusial kenapa jalan ini tidak akan pernah bisa terlihat normal layaknya jalan-jalan lain di Samarinda, bukan hanya hancur dan penuh debu (dan becek atau tergenang bila hujan), jalan ini juga tidak dilengkapi dengan penerangan yang memadai, suasananya pun masih mengerikan karena di kanan-kiri jalan tidak ada pemukiman warga. Sementara itu pantauan dari pantauan Kaltim Post, Sabtu (16/1) masih banyak kontainer yang terparkir di pinggir jalan. Hal tersebut membuat badan jalan menyempit. Sementara kondisi jalan juga tidak layak untuk dilintasi, banyak patahan jalan yang tidak ditangani misalnya dari Ir. Sutami menuju Jalan Teuku Umar, bahkan sistem drainase kawasan juga buruk. Kondisi tersebut lebih membahayakan kala malam karena kondisi jalan berpasir membuat kendaraan yang melintas ekstra hati-hati, belum lagi minimnya lampu penerangan jalan membuat kawasan tersebut rawan tidak kejahatan.

Aktivitas jalanan tersebut pun kian ramai lantaran menjadi jalan alternatif bagi warga Samarinda yang tidak ingin terkena macet dampak pembangunan Jembatan Kembar, perbaikan dari pemerintah atau swasta pun diharapkan paling tidak untuk melakukan perawatan rutin dengan pembersihan badan jalan maupun pengangkatan sedimen dari drainase.

5. Jalan Slamet Riadi

Pembangunan jembatan Kembar diharapkan untuk mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di Kota Samarinda. Dampak dari pembangunan jembatan ini menyebabkan kemacetan cukup panjang di jam-jam tertentu terutama di depan Kantor Polisi Samarinda sampai arah Jembatan Mahakam. Pada saat hujan terjadi beberapa titik genangan air yang mengganggu pengguna jalan.

V. PENUTUP

Hasil penelitian ini dilakukan untuk dipakai oleh para pembaca, praktisi dan akademisi sebagai wujud kecintaan kepada Kota Samarinda. Kota Samarinda ibarat kota tua yang tetap menarik bagi *investor*. Berikut beberapa kesimpulan dan saran dari penelitian ini :

A. Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa jalan kota Samarinda, (1) Banyak yang rusak seperti tersebut di atas; (2) Penyebab kerusakan jalan adalah karena kena banjir, tanah longsor dan sedimentasi, (3) Muatan truk yang terlalu besar tonasenya; (4) Kelambatan pemerintah kota memperbaiki; (5). Pemerintah mulai bulan Juni 2017 telah mulai perbaikan jalan yang rusak tersebut di atas dan pengendalian banjir dengan menggali saluran air; (7). Penyebab banjir ternyata buangan sisa bangunan jalan *Flyover* berupa kayu, batu dan pasir sedangkan yang lain karena sedimentasi akibat erosi dari pembukaan lahan untuk perumahan dan penambangan batubara.

B. Saran-saran

Saran-saran yang diberikan kepada praktisi dan pemerintah, (1). Pemerintah menginventarisir jalan yang rusak, (2). Segera menutup lobang sebelum terjadi korban seperti di Jl.M.Yamin di depan gapura Universitas Mulawarman yang memakan korban tergelincir lalu terlindas sepeda motor dan tewas, (3). Pemerintah segera berusaha meminimisir bencana banjir sebagai penyebab kerusakan jalan adalah karena kena banjir, tanah longsor dan sedimentasi, (4). Pengawasan muatan terhadap truk yang terlalu besar tonasenya, (5). Kecepatan pemerintah kota memperbaiki jalan rusak, (6). Perbaikan dari Pemerintah mulai bulan Juni 2017 telah mulai perbaikan jalan yang rusak tersebut di atas dan pengendalian banjir dengan menggali saluran air, (7). Memberi denda dan sanksi bagi kontraktor pelaksana proyek sekitar jalan yang membuang

sisa bangunan jalan *Flyover* berupa kayu, batu dan pasir sedangkan yang lain (9). Agar pengawasan jalan mengantisipasi sedimentasi akibat erosi dari pembukaan lahan perumahan dan penambangan batubara.

DAFTAR PUSTAKA

<http://id.wikipedia.org/wiki/Jalan>

<http://eksposkaltim.com/berita-5227-progres-pembangunan-jembatan-kembar-samarinda-mengecewakan.html>

<http://kaltim.prokal.co/read/news/319673-pembangunan-stagnan-soal-parkir-kontainer-yang-berantakan-di-pergudangan-samarinda.html>

<http://dishub.kaltimprov.go.id/index.php/informasi/item/207-himbauan-bagi-pengguna-jalan-untuk-menghindari-ruas-jalan-slamet-riyadi-samarinda>